

BERSIH MELAYANI UMAT HINDU MENUJU SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS (PERSPEKTIF FILSAFAT HINDU)

**Oleh I Ketut Subagiasta
Dosen STAHN Tampung Penyang Palangkaraya**

ABSTRACT

This article entitled “The Clean Service of Human Mankind of Hindu Concern for Human Resources be Quality Perspective Philosophy of Hindu”. Main description of this article about honest service for enlightenment spiritual Hindu human mankind, the openness in creation young generation of Hindu, the allegiance in life of the household, the balanced in dynamic of reality of working, and persevering study in the period of the yong generation. Then described also about the become Hindu generation which be wide perception, become generation ready as competitor, become the generation of Hindu be skillful, become the Hindu generation the best prestige, and become the Hindu generation militant.

Keywords: Clean Serving, Hindus, Qualified Human Resources

I. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang sejak tahun 1980-an mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan, karena dianggap akan mampu memberi jaminan keberlangsungan pembangunan dan sumber daya untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) menurut Swarbrooke, (1999: 13) adalah

“forms of tourism which meet the needs of tourists, the tourism industry, and host communities today without compromising the ability of future generations to meet their owns needs”.

Pariwisata berkelanjutan harus mampu mempertemukan kebutuhan wisatawan, pelaku industri pariwisata dan masyarakat setempat saat ini tanpa mengabaikan kesempatan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Penerapan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali sangat penting

dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan keberlanjutan pariwisata Bali serta memberi kesempatan pada generasi Bali yang akan datang untuk tetap dapat menikmati manfaat pembangunan kepariwisataan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya.

Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang terletak di Indonesia bagian tengah dengan luas wilayah $\pm 6.500 \text{ Km}^2$ yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali memiliki potensi wisata yang sangat menarik baik berupa potensi alam maupun potensi budaya. Potensi wisata alam Bali berupa potensi pantai, pegunungan, pertanian dan lainnya. Pariwisata budaya merupakan bentuk pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali yang menjadikan budaya Bali yang bernafaskan budaya Hindu sebagai landasan pengembangan pariwisata. Pembangunan pariwisata Bali telah mampu menjadikan daerah ini sebagai salah satu

destinasi wisata di dunia. Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat populer, dengan beberapa penghargaan seperti: *The Best Exotic Destination* oleh *The Luxury Travel Magazine* (2008), *The Best Destination In The World* (2004), *The Favorite Holidays Destination in Asia* oleh *Majalah Time* (Asia, 2001) (www.sinarharapan.co.id).

Kontribusi ekonomi pariwisata telah menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah di Bali dan menjadi modal ekonomi bagi pemerintah dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun pada kenyataannya dampak ekonomi pariwisata belum dinikmati oleh seluruh masyarakat Bali, hal tersebut terlihat dengan masih banyak masyarakat Bali yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu pengembangan pariwisata Bali harus dilaksanakan secara berimbang dan merata untuk pemeratakan pembangunan ekonomi masyarakat Bali sebagai sebuah kesatuan destinasi wisata pulau.

Pembangunan destinasi wisata Bali dalam satu kesatuan pulau penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya yang dimiliki. Sumariadhi (2009) dalam penelitiannya di daya tarik wisata Pulau Nusa Lembongan menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata di destinasi pariwisata Pulau Nusa Lembongan berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan fisik, sosial budaya dan ekonomi. Beberapa dampak negatifnya seperti ketimpangan dalam pemanfaatan energi listrik antara masyarakat lokal dengan usaha wisata, eksploitasi air bawah tanah, kerusakan terumbu karang, pudarnya sifat saling menghargai dan toleransi di kalangan masyarakat, sifat arogansi sebagai pemilik destinasi ketidakjujuran para pengusaha lokal dalam berbisnis dan ketimpangan kehidupan masyarakat pesisir dengan pegunungan.

Kondisi tersebut juga terjadi pembangunan pariwisata di Pulau Bali.

Pariwisata Bali menghadapi tantangan seperti konflik kepentingan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi antar daerah, tekanan investor telah mengancam keberlanjutan kepariwisataan Bali. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan di Bali, sebagai destinasi wisata pulau menuju pariwisata berkelanjutan harus dikelola dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Tulisan ini akan mengkaji permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bali untuk menjadi destinasi wisata pulau yang berkelanjutan dan manajemen kepariwisataan Bali sebagai destinasi wisata pulau yang berkelanjutan.

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha mendeskripsikan/menggambarkan/melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat (Kusmayadi, 2000:29). Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang berupa kalimat atau uraian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu yang bersumber dari kepustakaan baik berupa buku, artikel karya ilmiah, dan data yang diterbitkan oleh pemerintah dan lainnya yang berupa dokumen resmi. Dalam menganalisis data yaitu bersifat kualitatif, deskriptif dan interpretatif. Penyajian hasil penelitian dilakukan secara kualitatif melalui penyampaian dalam bentuk verbal dengan menggunakan analisis deskriptif interpretatif.

II. PEMBAHASAN

2.1. Upaya Pemerintah, Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Membangun Bali sebagai Destinasi Wisata Pulau yang Berkelanjutan

Propinsi Bali merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang meliputi hampir 85% dari luas seluruh wilayah. Pegunungan yang memanjang berupa hutan dan lahan pertanian yang merupakan sumber mata air bagi daerah di bawahnya. Dalam bentangan hutan tersebut juga terdapat empat buah danau

yaitu: Danau Batur, Danau Beratan, Buyan dan Tamblingan. Secara geografis pulau Bali terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh pegunungan yaitu bagian utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan bagian selatan dengan dataran rendah yang lebih luas dan landai.

Secara administratif Propinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota yaitu : Kabupaten Jembrana, Buleleng, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Kota Denpasar. Masing-masing daerah administratif memiliki potensi, permasalahan dan tingkat kemajuan pembangunan yang berbeda-beda, namun secara geografis yang berada dalam satu pulau yang kecil menimbulkan ketergantungan antara daerah yang satu dengan daerah lain menyangkut sumber daya seperti air. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang akan mengancam Bali secara keseluruhan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali dalam membangun pariwisata Bali yang berkelanjutan yaitu:

1. Penetapan jenis kepariwisataan yang dikembangkan yaitu pariwisata budaya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Bali No 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali dengan tujuan pembangunan kepariwisataan budaya Bali yaitu a. melestarikan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu; b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d. menciptakan kesempatan berusaha; e. menciptakan lapangan kerja; f. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; g. mengangkat citra bangsa; h. memperkuat rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa; dan i. mempererat persahabatan antarbangsa.
2. Pembagian ruang/zona pembangunan Bali khususnya dalam sektor pariwisata sesuai

dengan potensi dan fungsi ruang untuk menjaga keberlanjutan Bali sebagai satu kesatuan pulau, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Bali No.16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bali tahun 2009-2029, menyebutkan beberapa tujuan dalam mewujudkan tata ruang Bali diantaranya: a. ruang wilayah provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali, dan berwawasan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana; b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang; d. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota; e. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor.

Dalam pengembangan pariwisata Bali untuk menjaga keberlanjutan juga ditetapkan kawasan pariwisata dan kawasan daya tarik wisata khusus. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. Sedangkan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/ kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun

pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup

Pengembangan pariwisata perlu ditetapkan wilayah/ruang pengembangan untuk menghindari konflik kepentingan dan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya masyarakat. Dalam Perda No 16 tahun 2009 menetapkan 16 kawasan pariwisata yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Bali seperti:

1. Kabupaten Jembrana memiliki 2 kawasan wisata: Candikusuma dan Perancak
2. Kabupaten Buleleng memiliki 3 kawasan wisata yaitu Batu ampar, Kalibukbuk dan Air Sanih.
3. Kabupaten Bangli tidak memiliki kawasan wisata.
4. Kabupaten Tabanan memiliki 1 kawasan wisata yaitu Soka.
5. Kabupaten Badung memiliki 3 kawasan wisata yaitu Kuta, Tuban dan Nusa Dua.
6. Kota Denpasar memiliki 1 kawasan wisata yaitu Sanur.
7. Kabupaten Gianyar memiliki 2 kawasan wisata yaitu Ubud dan Lebih.
8. Kabupaten Klungkung memiliki 1 kawasan wisata yaitu Nusa Penida.
9. Kabupaten Karangasem memiliki 3 kawasan wisata yaitu Candidasa, Tulamben dan Ujung.

- Sedangkan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) yang ditetapkan (pasal 66) sebanyak 5 antara lain:
- a. KDTWK Kintamani di Kabupaten Bangli;
 - b. KDTWK Bedugul-Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Buleleng;
 - c. KDTWK Tanah Lot di Kabupaten Tabanan;
 - d. KDTWK Palasari di Kabupaten Jembrana;
 - e. KDTWK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana

Adanya Perda No 16 Tahun 2009 yang didalamnya menetapkan Kawasan Pariwisata dan KDTWK tersebut tidaklah bermaksud

untuk membatasi pembangunan pariwisata pada suatu daerah, melainkan untuk menjaga kelestarian, fungsi dan keseimbangan lingkungan di Bali agar tidak menimbulkan ancaman pada Pulau Bali umumnya. Oleh karena itu diperlukan persamaan persepsi dan komitmen dalam membangun Bali dengan memanfaatkan potensi masing-masing daerah, tanpa menonjolkan keegoan daerah, melalui pendekatan pembangunan yang holistik. Hal tersebut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Bali khususnya pariwisata di era otonomi daerah sekarang ini.

3. Pembagian manfaat ekonomi pariwisata yang bersumber dari pajak hotel dan restoran. Kabupaten Badung yang memperoleh pendapatan tertinggi dari pariwisata, memiliki kewajiban membagi sebagian pendapatannya untuk pembangunan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Bangli, Tabanan, Karangasem, Klungkung, Jembrana dan Buleleng.

Menjadikan Bali sebagai destinasi pulau yang berkelanjutan merupakan cita-cita yang luhur yang perlu didukung oleh seluruh komponen pariwisata di Bali. Hal tersebut sangat penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mengancam Pulau Bali di masa yang akan datang.

Dalam Arismayanti (2010: 254 - 157), permasalahan pembangunan pariwisata Bali masa kini dan masa depan adalah sebagai berikut:

1. Munculnya beberapa kasus pembangunan sarana kepariwisataan yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan kawasan sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah.
2. Kurang harmonisnya atau terintegrasinya beberapa aktivitas pembangunan prasarana dan sarana dengan sektor-sektor lain, baik di perairan laut, hutan, kawasan suci, atau wilayah-wilayah yang memang telah ditetapkan sebagai kawasan wisata.

3. Pemahaman masyarakat yang kurang lengkap terhadap rencana pembangunan sarana pariwisata dan kurangnya kesadaran dan tanggungjawab beberapa investor untuk mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
4. Pada era otonomi daerah yang ditandai dengan semangat berotonomi, khususnya oleh pemerintah kabupaten/kota, untuk mencapai peningkatan pendapatan daerah, muncul rencana-rencana pembangunan fasilitas pariwisata yang kurang mempertimbangkan aspek fisik lingkungan, sosial budaya, agama dan kemasyarakatan yang mungkin mempunyai dampak antar wilayah kabupaten atau bahkan sosial budaya mencakup wilayah Bali.
5. Penciptaan dan pemeliharaan keamanan wilayah merupakan faktor yang sangat dominan untuk dipertahankan dan ditingkatkan kondisinya terlebih lagi pada dewasa ini dimana faktor-faktor eksternal akan banyak berpengaruh kepada kondisi keamanan daerah Bali.

Sedangkan menurut Pitana (2005:169-175) pembangunan pariwisata Bali dalam satu kesatuan sebagai destinasi wisata pulau di era otonomi daerah menghadapi tantangan yang semakin berat. Adapun tantangan-tantangan tersebut antara lain :

1. Bali sebagai pulau yang kecil mempunyai keterbatasan sumber daya khususnya lahan dan air. Otonomi pada daerah Kabupaten, membuka peluang pembangunan fisik yang tidak terkendali. Tiap daerah akan membuat perencanaan pembangunan sendiri-sendiri atau bahkan tidak membuat perencanaan tata ruang pembangunan, melainkan hanya mengikuti keinginan investor.
2. Pergeseran paradigma otonomi dari 'peningkatan pelayanan pada masyarakat' menjadi "peningkatan pendapatan pemerintah" yang berarti peningkatan PAD tiap Kabupaten. Sebagai daerah pariwisata, maka PAD yang paling menjanjikan adalah

pajak hotel dan restoran (PHR). Untuk itu tiap kabupaten/kota akan berlomba-lomba membangun hotel dan restoran tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial budaya yang membahayakan pembangunan Bali dalam perpektif jangka panjang (*sustainable development*).

3. Dalam peningkatan PAD, tiap kabupaten/kota akan berusaha melakukan pemungutan pajak dan/atau restribusi secara lebih ekstensif dengan mengembangkan pajak dan restribusi baru. Dalam kondisi yang lebih ekstrim bisa saja tiap daerah akan mengenakan pajak jalan untuk setiap kendaraan yang masuk ke wilayahnya.
4. Konflik antar kabupaten menyangkut pemeliharaan dan penggunaan sumber daya pada perbatasan, atau sumber daya alam yang digunakan secara bersama-sama, seperti air sungai dan hutan. Masyarakat di Kabupaten di daerah hulu, yang merupakan sumber mata air, akan berkurang rasa tanggung jawabnya untuk memelihara kelestarian hutan. Hal tersebut terkait dengan rasa ketidakadilan, bahwa usaha mereka untuk memelihara hutan dan sumber air, sementara air dimanfaatkan untuk tujuan ekonomis (rafting, industri) oleh mereka yang ada di hilir yang sekaligus secara langsung menikmati manfaat ekonominya.
5. Kemungkinan munculnya frustasi pada masyarakat yang merasa menjadi objek, tetapi tidak merasa menikmati manfaat atau keuntungan dari pembangunan pariwisata.
6. Dari perspektif kebudayaan Bali, ada kekhawatiran bahwa otonomi model ini akan merapuhkan daya tahan Bali yang selama ini dikenal fleksibel, adaptif, yang berlandaskan agama Hindu dan mampu meredam pengaruh luar dengan baik. Masyarakat Bali dengan budaya agraris sebagai pilar utama akan semakin terancam dengan tingginya tingkat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, industri dan lainnya. Sehingga eksistensi subak

(organisasi petani sawah di Bali) akan terkikis. Aspek Tri Hita Karana yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan alam dan antara manusia dengan manusia lainnya akan terganggu, terlebih lagi bila kepemilikan tanah beralih kewarga non-Bali-Hindu.

2.2 Manajemen Kepariwisata Bali sebagai Destinasi Wisata Pulau yang Berkelanjutan.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi Bali sebagai sebuah destinasi wisata pulau memerlukan kesamaan pemikiran dan gerak untuk membangun Bali yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tersebut harus menjamin berlanjutan produksi dan proses dari sumber daya alam dan budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Dalam pengelolaan kepariwisataan Bali sebagai destinasi wisata pulau menuju pariwisata berkelanjutan berlandaskan pada prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam manajemen kepariwisataan Bali sebagai Destinasi Wisata Pulau yang berkelanjutan dapat digunakan pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan oleh Varesci (2002) dalam Yoeti (2008:245) meliputi:

1. *Comprehensive approach*, diperlukan adanya pendekatan menyeluruh didalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Pendekatan menyeluruh dalam manajemen pariwisata Bali sebagai destinasi wisata pulau dapat dilakukan dengan menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.
2. *Integrated approach*, pembangunan pariwisata harus terintegrasi, dimana pembangunan yang dilakukan di daerah (*local*) tidak bertentangan dengan pembangunan yang berskala nasional dan bahkan dengan kebijakan pembangunan

pariwisata dalam ruang lingkup global seperti yang digariskan oleh organisasi pariwisata dunia World Tourism Organization (WTO). Pembangunan pariwisata di kabupaten/kota di Bali dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan pembagian ruang/zona yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

3. *Strategic approach*, dalam melaksanakan pembangunan pariwisata untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan strategi yang ditetapkan berdasarkan pada suatu visi (sesuatu yang dicita-citakan) dan misi (cara pencapaiannya). Kesatuan visi dan misi pembangunan pariwisata Bali sebagai destinasi wisata pulau harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai perannya masing-masing.
4. *Participatory approach*, partisipasi masyarakat berhubungan dengan keterlibatan seluruh komponen dalam proses pengambilan keputusan (*decision making*) terhadap perencanaan yang akan dilakukan di kawasan yang akan ditingkatkan menjadi daerah tujuan wisata. Partisipasi masyarakat Bali hendaknya dilakukan mulai dari perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pengawasan. Partisipasi tersebut akan dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia masyarakat Bali khususnya sumber daya manusia pariwisata dengan memanfaatkan manfaat ekonomi pariwisata dalam pembangunan pendidikan.

Manajemen kepariwisataan Bali sebagai Destinasi Wisata Pulau dapat dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*). Perencanaan pembangunan kepariwisataan Bali harus dilakukan secara menyeluruh sesuai potensi dengan memperhatikan fungsi masing-masing ruang sehingga tidak merusak Bali sebagai satu kesatuan

ekosistem. Perencanaan harus menggunakan pendekatan komprehensif (menyeluruh) mengingat Bali sebagai sebuah pulau kecil. Perencanaan pengembangan pariwisata Bali seperti yang tertuang dalam Perda Bali No 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sudah mempertimbangkan Bali sebagai sebuah kesatuan ekosistem Pulau. Perencanaan tersebut perlu ditindak lanjuti dengan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota yang terintegrasi dengan RTWP Bali. Dengan terintegrasinya rencana pemanfaatan ruang khususnya pariwisata Bali akan dapat menghindari pemanfaatan ruang yang berlebihan ataupun konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang dengan sektor pembangunan lainnya. Dalam perencanaan ini diperlukan sikap yang arif dan bijaksana dari segenap komponen khususnya penentu kebijakan untuk tidak berpikir hanya untuk kepentingan daerahnya saja (era otonomi daerah) akan tetapi dalam kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang untuk Bali sebagai sebuah kesatuan pulau. Dalam perencanaan tersebut harus melibatkan dan mengedepankan partisipasi masyarakat lokal sebagai pemilik karena akan bersentuhan langsung dengan pengembangan pariwisata, bukan mengedepankan kepentingan investor.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pelaksanaan perencanaan pariwisata Bali dengan melihat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata Bali sesuai Perda No 16 Tahun 2009, setiap daerah kabupaten/ kota di Bali hendaknya menjadikannya pedoman dalam pengembangan pariwisata sesuai dengan potensi dan peruntukannya untuk kepentingan pembangunan Bali yang menyeluruh. Pembangunan kepariwisataan di setiap daerah kabupaten /kota disesuaikan dengan perencanaan pemanfaatan ruang dalam pembangunan pariwisata Bali yakni kawasan pariwisata ataupun kawasan daya

tarik wisata khusus. Setiap daerah kabupaten/kota akan memanfaatkan ruang wilayahnya masing-masing sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Pengorganisasian dalam pemanfaatan ruang sesuai perda tersebut sudah baik apabila bisa diterapkan dan didukung oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Dalam era otonomi daerah ini merupakan tantangan yang sangat berat, karena ada kecenderungan memanfaatkan ruang wilayah yang mementingkan kepentingan daerahnya masing-masing dengan mengabaikan kepentingan ruang Bali sebagai sebuah kesatuan pulau.

3. Pengarahan/pelaksanaan (*Actuating*)

Dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata bali sebagai destinasi wisata pulau setiap daerah kabupaten harus dapat menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam pembangunan pariwisata dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Masyarakat setempat diharapkan ikut mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap suatu destinasi wisata, serta diharapkan akan memberi manfaat ekonomi pada masyarakat. Partisipasi masyarakat akan dapat dilaksanakan jika sumber daya manusia pariwisata khususnya masyarakat lokal Bali telah memadai dan terus harus ditingkatkan. Pemerintah sebagai regulator harus mampu meningkatkan kualitas SDM masyarakat Bali dengan menyelenggarakan pendidikan yang murah khususnya di daerah-daerah yang perkembangan ekonominya masih lamban dengan

menggunakan manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata.

Ketimpangan ekonomi antar Kabupaten/kota di Bali merupakan ancaman dalam keberlanjutan pembangunan Bali. Untuk menjadikan Bali sebagai destinasi wisata pulau menuju pariwisata berkelanjutan harus dilakukan dengan pemerataan pembangunan melalui perimbangan keuangan pada daerah yang perkembangan ekonominya rendah. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata lebih besar harus membagi pendapatannya ke daerah lain. Adanya kompensasi dana bagi daerah/masyarakat di sekitar hutan untuk menjaga kelestariannya, sehingga hutan bisa tetap lestari dan masalah sumber daya air bisa ditanggulangi.

Distribusi pendapatan dari sektor pariwisata antar daerah di Bali secara adil dan berimbang dalam mendukung pemanfaatan ruang wilayah sesuai kepentingan pembangunan Bali sebagai sebuah destinasi wisata Bali yang komprehensif dan terintegrasi penting dilakukan untuk menghindari kerusakan lingkungan Bali. Hal tersebut bisa terjadi akibat pemanfaatan ruang berlebih dalam mengejar PAD suatu daerah dan juga akibat kecemburuan dalam perolehan manfaat ekonomi pariwisata.

Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan bisa menjalankan rencana pemanfaatan ruang pembangunan pariwisata Bali sesuai yang ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi untuk menjadikan Bali sebagai sebuah destinasi wisata Pulau. Dalam kegiatan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pemasaran pariwisata harus dilakukan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama dan terintegrasi dalam pengembangan dan pelaksanaannya.

4. Pengawasan (*controlling*)

Kegiatan pengawasan dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup pedoman penyusunan pedoman,

evaluasi dampak kegiatan pariwisata serta pengembangan indikator untuk mengukur dampak pariwisata. Di era otonomi daerah kegiatan pengawasan dan evaluasi pembangunan kepariwisataan di Bali lebih banyak terjadi pada tingkat Kabupaten/kota. Hal tersebut menyebabkan pembangunan pariwisata di Bali tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang yang ada, melainkan eksploitasi potensi wisata yang berlebihan dalam pembangunan masing-masing daerah tanpa mempertimbangkan keberlanjutan Bali.

Untuk menjadikan Bali sebagai destinasi wisata pulau yang berkelanjutan hendaknya otonomi daerah menyangkut pembangunan kepariwisataan tidak diberikan pada tingkat kabupaten melainkan pada tingkat pemerintah Propinsi. Hal tersebut penting karena pariwisata bersifat lintas sektoral, daerah dan bidang. Dengan demikian pengawasan terhadap implementasi rencana pembangunan pariwisata lebih mudah dilakukan dan berkurangnya komplik kepentingan khususnya dalam bidang pariwisata.

Dalam pelaksanaan pembangunan Bali sebagai destinasi wisata pulau khususnya dalam pemanfaatan ruang pembangunan pariwisata harus selalu diawasi dalam pelaksanaannya. Setiap daerah kabupaten/kota harus menindaklanjuti peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dengan menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Pemerintah pusat maupun provinsi harus mengawasi dan memberi sanksi bagi daerah kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti dengan menetapkan rencana pemanfaatan ruang wilayahnya khususnya dalam pembangunan pariwisata. Hal tersebut penting mengingat ada kecenderungan daerah kabupaten/kota menunda penetapan rencana pemanfaatan ruang sesuai RTRWP Bali untuk bisa memanfaatkan ruang diluar peruntukannya.

Sanksi dapat dilakukan dalam pembagian distribusi hasil pendapatan pariwisata khususnya dari pajak hotel dan restoran. Selain itu pengawasan dalam pemanfaatan dana kontribusi dari pajak hotel dan restoran harus dapat digunakan untuk memajukan daya tarik wisata yang ada di tiap daerah. Selain itu lemahnya penegakan hukum merupakan ancaman yang serius dalam pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Bali mempunyai banyak peraturan dalam pembangunan khususnya pembangunan kepariwisataan yang berlandaskan pariwisata budaya. Pembangunan fasilitas pariwisata dan lainnya yang harus mencerminkan arsitektur bangunan Bali, batas kemiringan tanah yang boleh dibangun bangunan, jarak sempadan sungai dan pantai dari bangunan sudah ditetapkan dalam peraturan. Namun masih banyak penyimpangan seperti: bangunan di tebing (daya tarik wisata Penelokan), bangunan yang tidak mencerminkan arsitektur Bali, bangunan di tepi pantai dan yang lainnya tak tersentuh oleh hukum

III. PENUTUP

Pembangunan pariwisata di Bali memang telah memberi manfaat ekonomi yang cukup besar bagi perekonomian regional Bali. Namun kemajuan pembangunan pariwisata di Bali juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti Kemajuan pembangunan pariwisata di Bali juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti pembangunan sarana kepariwisataan yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan kawasan, kurang harmonisnya beberapa aktivitas pembangunan, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan tanggungjawab beberapa investor, otonomi daerah, serta penciptaan dan pemeliharaan keamanan wilayah. Tantangan yang dihadapi oleh pariwisata Bali yaitu keterbatasan sumber daya khususnya lahan dan air, pergeseran paradigma otonomi, konflik antar kabupaten, munculnya

frustasi pada masyarakat, dan rapuhnya budaya Bali. Upaya pemerintah Provinsi Bali melalui penetapan jenis kepariwisataan yang dikembangkan (pariwisata budaya), penetapan zona/ruang wilayah pembangunan dan pendistribusian manfaat ekonomi pariwisata dari Kabupaten Badung ke kabupaten lainnya.

Dalam pembangunan pariwisata di Bali untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut diperlukan konsep pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan memerlukan manajemen yang menggunakan pendekatan komprehensif, terintegrasi, strategi dan pendekatan partisipasi masyarakat. Sehingga kepariwisataan Bali mempunyai kesatuan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dengan melibatkan masyarakat serta distribusi pendapatan yang adil dari pariwisata. Kesatuan manajemen dalam pembangunan pariwisata Bali berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan lingkungan alam, ekonomi, sosial dan budaya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali akan mendukung Bali menjadi destinasi wisata pulau yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029.
- Anonim. 2012. Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali.
- Arismayanti, Ni Ketut. 2010. "Arah Pembangunan dan Pengembangan pariwisata Berkelanjutan di Bali" dalam buku Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global. Denpasar. Udayana press
- Kusmayadi dan Endar Sugiarto. 2000. Metodologi Penelitian dalam Bidang